



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan
Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif
Kolaboratif

PERJANJIAN KINERJA 2026

KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



#Tuba

Transparan , Ulet , Bersahaja , Akseleratif



TRANSPARAN



ULET



BERSAHAJA



AKSELERATIF



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DANANG SURYO WIBOWO, S.H., LL.M.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 01 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
**Oleh: DANANG SURYO WIBOWO, S.H.,
LL.M.**

DANANG SURYO WIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197612092001121002

**Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

- Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal	82
2	Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan	Persentase peningkatan pengendalian perkara	63
		Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum	91
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset negara	85
3	Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	75
4	Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	85
		Tingkat penerapan etika profesi jaksa	82

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

- Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
**Oleh: DANANG SURYO WIBOWO, S.H.,
LL.M.**

DANANG SURYO WIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197612092001121002

Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIA GENTA, S.H.**
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

**Pihak Pertama,
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: **ARIA GENTA, S.H.**

ARIA GENTA, S.H.
NIP. 197008301991121001

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

Pihak Pertama,
**KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI
TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: ARIA GENTA, S.H.

ARIA GENTA, S.H.
NIP. 197008301991121001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

**Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI
TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: **DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.**

DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.
NIP. 199312232018011002

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

- Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	Tingkat efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan	83
2	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Tinggi	82
3	Meningkatnya Pemahaman Hukum Masyarakat yang Memuaskan Pemangku Kepentingan	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Lukumpenkum	3.7
		Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat atas Materi Sosialisasi Hukum	84

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

- Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.

DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.
NIP. 199312232018011002



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEKRIT DIRGA SAPUTRA, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Juni 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

**Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: **DEKRIT DIRGA SAPUTRA, S.H.**

DEKRIT DIRGA SAPUTRA, S.H.
NIP. 199007052015021002

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82
2	Meningkatnya keberhasilan penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri	81
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra penuntutan di wilayah Kejaksaan Negeri	81
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak Pidana Umum yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap) dan telah dieksekusi di wilayah Kejaksaan Negeri	89
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3,7
4	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System	86

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta

- Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Juni 2026

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

Pihak Pertama,
**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: DEKRIT DIRGA SAPUTRA, S.H.

DEKRIT DIRGA SAPUTRA, S.H.
NIP. 199007052015021002



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

**Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**

ADIMAS HARYOSETYO, S.H.
NIP. 199009132014031001

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	82
2	Meningkatnya keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana cukai, tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, dan TPPU serta pelanggaran HAM Berat secara transparan, akuntabel dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	78
		Tingkat keberhasilan pengendalian operasi dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	76
3	Meningkatnya keberhasilan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana khusus	Tingkat keberhasilan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU	28
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3.7
5	Meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan	Tingkat kualitas penanganan perkara yang terekam dalam Case Management System	86
6	Meningkatnya penegakan hukum yang adil, humanis, proporsional, dan efisien	Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	63

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

- 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

Pihak Pertama,
**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**

ADIMAS HARYOSETYO, S.H.
NIP. 199009132014031001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

**Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: **DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H.,
M.H.**

DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H., M.H.
NIP. 198706142015021001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG
BAWANG
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas pelayanan hukum dalam rangka pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara	Indeks Persepsi atas pelayanan hukum	3.7
2	Meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan Tinggi	82
3	Meningkatnya keberhasilan penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara transparan, akuntabel, dan profesional	Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi	81
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara perdata melalui jalur non-litigasi	81
		Tingkat keberhasilan penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	81
4	Meningkatnya keberhasilan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	Tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata	81
		Tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata	81
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang hukum	Indeks kepuasan layanan Publik bidang hukum (Layanan hukum gratis, konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan hukum, dan penyuluhan hukum)	3.7

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik bidang penegakan hukum	Indeks kepuasan layanan publik bidang penegakan hukum	3.7
7	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Advocaat Generaal dan Jaksa Pengacara Negara	Tingkat penjaminan kualitas pengajuan pendapat teknis hukum untuk permohonan kasasi lingkup peradilan umum, TUN, agama, dan militer	100

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

Pihak Pertama,
**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: **DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H.,
M.H.**

DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H., M.H.
NIP. 198706142015021001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARLIANSYAH ADAM, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI PADA KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

**Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BARANG BUKTI PADA KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: ARLIANSYAH ADAM, S.H.

ARLIANSYAH ADAM, S.H.
NIP. 198001232005011004

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI PADA
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

- Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi	Tingkat keberhasilan kegiatan penelusuran aset	91
		Tingkat keberhasilan pemulihan aset hasil tindak pidana	91
		Tingkat keberhasilan perampasan aset hasil tindak pidana	91
2	Terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern	Tingkat efektivitas pengelolaan data aset negara berbasis teknologi	4.1
		Tingkat efektivitas pengelolaan Rupbasan	4.1
		Tingkat efektivitas penyelesaian penyelamatan aset negara	4.1

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

- Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.

ROLANDO RITONGA, S.H.,M.H.
NIP. 198410252007121001

Pihak Pertama,
**KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG
BUKTI PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: ARLIANSYAH ADAM, S.H.

ARLIANSYAH ADAM, S.H.
NIP. 198001232005011004



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARUHUM YUNianto, A.Md.**
Jabatan : **KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : **ARIA GENTA, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: ARIA GENTA, S.H.

ARIA GENTA, S.H.
NIP. 197008301991121001

Pihak Pertama,
KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: MARUHUM YUNianto, A.Md.

MARUHUM YUNianto, A.Md.
NIP. 198406222009121003

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI TULANG

BAWANG

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Layanan internal kepegawaian terselenggara sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku	Layanan urusan tata usaha kepegawaian berupa usul kenaikan pangkat, cuti pegawai, satya lancana karya satya dan kenaikan gaji berkala dll berjalan dengan baik	100
2	Penempatan SDM pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang telah sesuai dengan kompetensi masing - masing pegawai	Penempatan pegawai disesuaikan dengan SK Jabatan, dan kebutuhan beban kerja di masing - masing bidang	100
3	Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang telah memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian	Usulan untuk dapat mengikuti diklat teknis maupun non teknis bagi pegawai Kejaksaan se- wilayah lampung sesuai dengan SOP yang berlaku	100
4	Terlaksananya pendistribusian maupun layanan administrasi persuratan secara digital sesuai aturan yang berlaku	Penggunaan aplikasi surat menyurat secara elektronik seperti SIPEDE dan layanan laporan bulanan melalui SILABIN serta layanan lainnya yang dapat diakses secara online dapat berjalan dengan baik	100
5	Terlaksananya pengelolaan anggaran sesuai dengan SOP dan aturan peraturan keuangan yang berlaku	Pengelolaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan maupun pendapatan dan piutang negara dikelola secara optimal sesuai SAP dan dilengkapi dokumen pendukung/bukti transaksi	100

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

- 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI
TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: ARIA GENTA, S.H.

ARIA GENTA, S.H.
NIP. 197008301991121001

Pihak Pertama,
KEPALA URUSAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN DAN
KEUANGAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA
SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI TULANG
BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: MARUHUM YUNianto, A.Md.

MARUHUM YUNianto, A.Md.
NIP. 198406222009121003



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAYU ROBBY SUGARA, S.H.**
Jabatan : KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI,
DAN PERPUSTAKAAN PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ARIA GENTA, S.H.**
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Februari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: ARIA GENTA, S.H.

ARIA GENTA, S.H.
NIP. 197008301991121001

**Pihak Pertama,
KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DATA STATISTIK
KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN
PERPUSTAKAAN PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: BAYU ROBBY SUGARA, S.H.

BAYU ROBBY SUGARA, S.H.
NIP. 198402292009121001

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI

INFORMASI, DAN PERPUSTAKAAN PADA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI

TULANG BAWANG

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Indeks kepuasan layanan dukungan internal manajemen Kejaksaan Negeri	Mengelola perpustakaan, melakukan dokumentasi hukum, dan menyediakan referensi hukum bagi kebutuhan jaksa dan pegawai.	300
2	Tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap standar operasional prosedur	Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik perkara kriminal secara akurat dan tepat waktu.	12
3	Tingkat utilisasi sarana dan prasarana Kejaksaan Negeri	Melaksanakan Penerapan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi serta sistem jaringan di lingkungan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	10
		Melakukan perencanaan pengadaan, pengelolaan, penyimpanan, dan penghapusan barang inventaris kantor serta mengurus kebutuhan rumah tangga kantor.	50

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Februari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN PADA KEJAKSAAN NEGERI
TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: ARIA GENTA, S.H.

ARIA GENTA, S.H.
NIP. 197008301991121001

Pihak Pertama,
KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DATA STATISTIK KRIMINAL
DAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PERPUSTAKAAN PADA
SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI TULANG
BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: BAYU ROBBY SUGARA, S.H.

BAYU ROBBY SUGARA, S.H.
NIP. 198402292009121001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GALAN AMIR, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI
TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: **DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.**

DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.
NIP. 199312232018011002

**Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: **GALAN AMIR, S.H.**

GALAN AMIR, S.H.
NIP. 199607292022031001

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif telah dilaksanakan dengan baik	Telah terlaksannaya kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan	2 kegiatan
2	Terlaksananya pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara	Telah terlaksannya kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang bersama dengan para aparatur penegak hukum dan aparatur desa	1 kegiatan
3	Terlaksananya pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian informasi serta edukasi hukum kepada masyarakat dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang langsung dapat diakses oelah masyarakat	Melakukan Kegiatan Jaksa Menyapa melalui sarana Radio di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	3 kegiatan
4	Terlaksananya pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana	Terlaksannaya Penerangan Hukum serta Penyuluhan Hukum yang dilakukan ke kampung dan desa diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	3 kegiatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Terlaksananya pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah yang dilaksanakan di beberapa sekolah Menengah Pertama di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	3 kegiatan

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.

DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.
NIP. 199312232018011002

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: GALAN AMIR, S.H.

GALAN AMIR, S.H.
NIP. 199607292022031001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GIAN APRILIAN SYAH, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI
TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: **DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.**

DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.
NIP. 199312232018011002

**Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: **GIAN APRILIAN SYAH, S.H.**

GIAN APRILIAN SYAH, S.H.
NIP. 199604012020121010

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif telah dilaksanakan dengan baik	Telah terlaksannaya kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan	100 %, 1 Kegiatan, 12 Bulan
2	Terlaksananya pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara	Telah terlaksannya kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang bersama dengan para aparatur penegak hukum dan aparatur desa	100 %, 1 Kegiatan, 12 Bulan
3	Terlaksananya pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian informasi serta edukasi hukum kepada masyarakat dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang langsung dapat diakses oelah masyarakat	Melakukan Kegiatan Jaksa Menyapa melalui sarana Radio di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	100 %, 3 Kegiatan, 12 Bulan
4	Terlaksananya pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana	Terlaksannaya Penerangan Hukum serta Penyuluhan Hukum yang dilakukan ke kampung dan desa diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	100 %, 3 Kegiatan, 12 Bulan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5	Terlaksananya pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah yang dilaksanakan di beberapa sekolah Menengah Pertama di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	100 %, 3 Kegiatan, 12 Bulan

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.

DIMAS TRYANDA SANY, S.H., M.H.
NIP. 199312232018011002

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: GIAN APRILIAN SYAH, S.H.

GIAN APRILIAN SYAH, S.H.
NIP. 199604012020121010



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FITRA AGUSTAMA, S.H.**
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI
TULANG BAWANG

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DONI MARIANTO, S.H.**
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 02 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: DONI MARIANTO, S.H.

DONI MARIANTO, S.H.
NIP. 198903192014031002

**Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TULANG
BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: FITRA AGUSTAMA, S.H.

FITRA AGUSTAMA, S.H.
NIP. 199602212020121009

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN

NEGERI TULANG BAWANG

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya dengan baik pemberian bimbingan, pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan, hasil penyidikan serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti/sitaan, mengadministrasikan serta mendokumentasikannya	Melakukan pemeriksaan tambahan serta membuat konsep rencana surat dakwaan	100%, 5 Kegiatan, 7 Bulan
2	Terlaksananya dengan baik pemberian bimbingan, pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan, hasil penyidikan serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti/sitaan, mengadministrasikan serta mendokumentasikannya	Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara serta memberi petunjuk guna melengkapi berkas perkara	100%, 10 Berkas, 7 Bulan
3	Terlaksananya dengan baik pemberian bimbingan, pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan, hasil penyidikan serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti/sitaan, mengadministrasikan. serta mendokumentasikannya	Meneliti sah tidaknya penghentian penyidikan, jika penyidikan dihentikan	100%, 1 Kegiatan, 7 Bulan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Terlaksananya dengan baik pemberian bimbingan, pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan,hasil penyidikan serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti/sitaan, mengadministrasikan. serta mendokumentasikannya	Menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti yang dilimpahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum	100%, 5 Perkara, 7 Bulan
5	Terlaksananya dengan baik pemberian bimbingan,pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan,hasil penyidikan serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti/sitaan, mengadministrasikan. serta mendokumentasikannya	Mengikuti perkembangan penyidikan serta melakukan koordinasi dengan penyidik terhadap penyidikan perkara tertentu	100%, 5 Kegiatan, 7 Bulan

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 02 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: **DONI MARIANTO, S.H.**

DONI MARIANTO, S.H.
NIP. 198903192014031002

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK
PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: **FITRA AGUSTAMA, S.H.**

FITRA AGUSTAMA, S.H.
NIP. 199602212020121009



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **REZA MARDIANTO, S.H.**
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DONI MARIANTO, S.H.**
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: DONI MARIANTO, S.H.

DONI MARIANTO, S.H.
NIP. 198903192014031002

**Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN
EKSAMINASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: REZA MARDIANTO, S.H.

REZA MARDIANTO, S.H.
NIP. 199403262022031001

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA SEKSI TINDAK

PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya dengan baik penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan.	Menjalin hubungan baik dengan instansi penegak hukum lain seperti Kepolisian, Kementerian Hukum dan Ham, Kehakiman dan TNI guna bersinergi dalam penanganan tindak perkara pidana umum	2 Kegiatan
		Pelaksanaan penetapan perkara yang telah ditentukan oleh pengadilan	10 Perkara
2	Terlaksananya dengan baik penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahap penuntutan.	Melakukan tahap penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi sesuai aturan perundang - undangan;	10 Perkara
		Mendorong pengisian Case Management System (CMS) Pidana Umum sesuai dengan status penanganan perkara yang sedang berlangsung	10 Perkara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Pelaksanaan pertimbangan serta penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berkeadilan di bidang pidana umum dan khusus dengan melihat rasa keadilan di masyarakat dengan cara Restoratif Justice	1 Kegiatan

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: DONI MARIANTO, S.H.

DONI MARIANTO, S.H.
NIP. 198903192014031002

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN
EKSAMINASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: REZA MARDIANTO, S.H.

REZA MARDIANTO, S.H.
NIP. 199403262022031001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD FATAH ABQARI, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
Nama : **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**

ADIMAS HARYOSETYO, S.H.
NIP. 199009132014031001

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN
PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI TINDAK
PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI TULANG
BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: **MUHAMMAD FATAH ABQARI, S.H.**

MUHAMMAD FATAH ABQARI, S.H.
NIP. 199611152020121012

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI TINDAK

PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat tersusun dengan baik	Menyusun laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanaan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang	5 Kegiatan
		Telah melakukan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyapan informasi pemantauan dan evaluasi	2 Kegiatan
		Telah melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja	2 Program
		Telah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi	4 Dokumen
		Telah melakukan penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis	2 Dokumen

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

- 2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: ADIMAS HARYOSETYO, S.H.

ADIMAS HARYOSETYO, S.H.
NIP. 199009132014031001

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI
PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI
TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: MUHAMMAD FATAH ABQARI, S.H.

MUHAMMAD FATAH ABQARI, S.H.
NIP. 199611152020121012



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **REGINA PRANANDA ROMLI, S.H.**
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA, DAN EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.**
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: ADIMAS HARYOSETYO, S.H.

ADIMAS HARYOSETYO, S.H.
NIP. 199009132014031001

**Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM
LUAR BIASA, DAN EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK
PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI TULANG
BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: REGINA PRANANDA ROMLI, S.H.

REGINA PRANANDA ROMLI, S.H.
NIP. 199507032019022012

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA, DAN EKSEKUSI PADA
SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pidsus Kejaksaan Negeri Tulang Bawang telah melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus	Menyusun laporan pelaksanaan tindakan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, pelaksanaan penetapan hakim, upaya hukum biasa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana kepabeanan, cukai, dan tindak pidana pencucian uang	5
		Telah melakukan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan data dan penyapan informasi pemantauan dan evaluasi	3
		Telah melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan rencana kerja	4
		Telah melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan administrasi	4
		Telah melakukan penyiapan pelaksanaan dan pengendalian, pemberian bimbingan teknis	4

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

- 2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS PADA KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: ADIMAS HARYOSETYO, S.H.

ADIMAS HARYOSETYO, S.H.
NIP. 199009132014031001

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA,
DAN EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: REGINA PRANANDA ROMLI, S.H.

REGINA PRANANDA ROMLI, S.H.
NIP. 199507032019022012



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MONICA, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG
BAWANG**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
**Oleh: DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H.,
M.H.**

DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H., M.H.
NIP. 198706142015021001

**Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM PADA
SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: MONICA, S.H.

MONICA, S.H.
NIP. 199802152022032005

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG
TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus	Melakukan Bantuan Hukum atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah pusat maupun daerah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	1
		Telah dilakukannya pembuatan telaahaan Legal Opinion / Pertimbangan Hukum atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah pusat maupun daerah	5
		Terlaksananya hubungan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) dengan Instansi Pusat dan Daerah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	5
		Terlaksannaya bantuan hukum kepada Negara/Pemerintah melalui BUMN dan BUMD dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait perkara perdata	5
2	Terlaksananya tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusu	Telah terlaksannaya penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan baik sesuai dengan prosedur serta aturan peraturan yang berlaku	2

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

- 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
- 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H.,
M.H.

DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H., M.H.
NIP. 198706142015021001

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM PADA SEKSI
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: MONICA, S.H.

MONICA, S.H.
NIP. 199802152022032005



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DWI BERLIAN PERMATA PUTRI, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini... (dst). Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Menggala, 01 Januari 2026

**Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: **DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H.,
M.H.**

DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H., M.H.
NIP. 198706142015021001

**Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA PADA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA
NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG**



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: **DWI BERLIAN PERMATA PUTRI,
S.H.**

DWI BERLIAN PERMATA PUTRI, S.H.
NIP. 199708022022032005

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA SEKSI PERDATA DAN

TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG

TAHUN 2026

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2026

Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus	Telah dilakukannya pembuatan telaahaan Legal Opinion / Pertimbangan Hukum atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah pusat maupun daerah	1
		Telah terlaksannanya penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan baik sesuai dengan prosedur serta aturan peraturan yang berlaku	2
		Terlaksananya hubungan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) dengan Instansi Pusat dan Daerah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	3
		Terlaksannaya bantuan hukum kepada Negara/Pemerintah melalui BUMN dan BUMD dengan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait perkara perdata	1

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Keenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Menggala, 01 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA
KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diverifikasi Pimpinan
via MySimkari
Oleh: DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H.,
M.H.

DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H., M.H.
NIP. 198706142015021001

Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA
SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN
NEGERI TULANG BAWANG



Perjanjian ini telah
diajukan Elektronik
Via MySimkari
Oleh: DWI BERLIAN PERMATA PUTRI,
S.H.

DWI BERLIAN PERMATA PUTRI, S.H.
NIP. 199708022022032005